

**BAB I**

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MASKAPAI PENERBANGAN  
ATAS PENGALIHAN MODA PESAWAT DARI LION AIR KE WINGS  
AIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENGANGKUTAN**

**A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang bercirikan nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas – batas, hak – hak dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang – Undang. Dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional yang mendukung dalam pertumbuhan ekonomi. Indonesia sebagai warga dunia harus turut serta dalam perkembangan dan pembangunan ekonomi global agar tetap berpijak pada perannya untuk membawa masyarakat yang sejahtera, sehingga tercapai tujuan Negara yang adil dan makmur dalam lintasan proses perkembangan ekonomi, politik, sosial, dan budayanya.

Masyarakat serta pemerintah di Indonesia saat ini sedang menghadapi proses pembangunan di era 4.0 dimana hampir semua aktifitas menggunakan digitalisasi. Pada setiap era industrialisasi pemerintah tetap harus dapat menjelaskan fungsi dengan baik di bidang ekonomi, bidang politik, bidang

sosial, dan budaya (Epoleksosbud). Fungsi pemerintah didalam bidang ekonomi terkait dengan fungsi stabilitas, alokasi dan distribusi. Salah satu upaya menciptakan kestabilan ekonomi harus dilakukan di bidang transportasi.

Transportasi merupakan proses pemindahan dan pengangkutan manusia, hewan dan barang dari suatu tempat menuju tempat lain dengan menggunakan Moda Transportasi.<sup>1</sup> Jenis moda transportasi yang ada di Indonesia beragam, antara lain transportasi darat, laut, dan udara. Masing – masing memiliki keunggulan. Transportasi darat banyak digunakan oleh masyarakat untuk memudahkan segala aktifitas baik di dalam kota maupun diluar kota, contohnya seperti mobil, motor, kereta, bis dan lain – lain. Transportasi laut contohnya seperti kapal feri yang sering digunakan untuk membantu dalam jasa pengangkutan barang maupun orang – orang yang akan meyeberangi antar pulau.

Ada juga moda transportasi udara yang memiliki keunggulan dapat membawa barang atau penumpang relatif dengan waktu tempuh lebih cepat daripada moda transportasi lainnya. Bahwa penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, padat modal, manajemen yang andal serta memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal. Keunggulan dalam kecepatan transportasi udara ini dalam praktiknya sering terkendala karena pelayanan yang buruk dari maskapai

---

<sup>1</sup> Pengertian Transportasi menurut. Soeseno Bong, M.M., dalam bukunya berjudul *Managemen Resiko, Krisis, dan Bencana untuk Industri Pariwisata yang Berelanjutan*

penerbangan. Salah satu pelayanan yang buruk adalah adanya pengalihan pesawat dari maskapai yang satu ke maskapai yang lain. Kerugian yang ditimbulkan selain dari keterlambatan, konsumen dirugikan secara finansial dan immaterial. Contoh dalam kasus pengalihan moda transportasi udara ialah maskapai Lion Air ke maskapai Wings Air. Pesawat – pesawat yang ada di bandar udara memiliki peraturannya masing – masing. Peran bandar udara sendiri dijelaskan dalam Pasal 5 yaitu salah satunya meliputi tempat kegiatan alih moda transportasi dan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan No. 39 Tahun 2019 Tentang Tata Nal Kebandarudaraan Nasional, artinya menjadi tempat perpindahan dari moda transportasi udara yang satu ke moda transportasi lain atau sebaliknya dalam bentuk interkoneksi antarmoda pada simpul transportasi.

Saat ini banyak sekali perusahaan – perusahaan yang mendirikan jasa penerbangan dengan biaya yang sangat terjangkau oleh para konsumen. Dalam industri penerbangan sudah memiliki peranan penting dalam pembangunan segala sektor. Dunia penerbangan juga memiliki ikatan erat dengan *International Air Transport Association* (IATA), asosiasi tersebut mengatakan data jumlah penumpang pesawat udara secara global diperkirakan kurang lebih 3,6 miliar pada tahun 2016 atau naik 5,3 persen per tahunnya.

Sejak tahun 2000 dunia penerbangan di Indonesia sudah meningkat<sup>2</sup> dan terus mengalami kenaikan yang cukup pesat, terutama di sektor penerbangan berbiaya murah (LCC). Salah satu contoh maskapai terbesar di Indonesia adalah Lion Air yang melayani lebih dari 40 persen pasar. Lion Air sendiri merupakan maskapai *hybrid*, penggabungan antara maskapai LCC dengan maskapai layanan medium.<sup>3</sup> LCC sendiri merupakan kepanjangan dari *Low-Cost Carrier* yaitu maskapai penerbangan yang bertarif rendah. Tarif sendiri dalam Pasal 126 Ayat (2) bagian keempat Undang – Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menyatakan tarif dibagi menjadi 2 yaitu tarif pelayanan ekonomi dan non-ekonomi, dilanjut Ayat (3) bahwa biaya tarif yang dikeluarkan atas komponen tarif pajak, pajak, iuran wajib asuransi dan biaya tustlah/tambahan (*surcharge*).

Konsumen dapat membeli tiket penerbangan melalui *online* maupun secara langsung di *outlet – outlet* yang telah menyediakan tiket segala jenis pelayanan jasa penerbangan termasuk tiket maskapai Lion Air yang sering di beli oleh konsumen. Konsumen yang membeli tiket atau mereservasi tiket pesawat berhak atas penyediaan layanan tempat duduk (*seat*) sesuai pesanan atau permintaan penumpang yang sudah tersedia di dalam *set plain seat*. Perlu diketahui oleh penumpang bahwa tiket pesawat yang sudah dibeli bukanlah hanya sekedar alat *chek in* ketika hendak memasuki gerbang atau *gate* menuju

---

<sup>2</sup> Ririn Radiawati, *Tujuh Negara Dengan Bandara Tersibuk Sejagat*, <http://www.m.merdeka.com/>, 28 Januari 2013, dikutip tanggal 6 Februari 2020

<sup>3</sup> Traveloka, *Infografis Penerbangan Indonesia*, <https://www.traveloka.com/en/explore/test/infografis-penerbangan-indonesia/22012>, 2 Februari 2020, dikutip tanggal 6 Februari

pesawat, melainkan tiket pesawat merupakan bentuk dari perjanjian yang mengikat antara penumpang dengan maskapai penerbangan yang dipilihnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 27 Undang – Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menyatakan “..tiket ialah dokumen cetak melalui proses elektronik atau bentuk lainnya yang merupakan salah satu bukti adanya perjanjian angkutan udara dengan penumpang dan timbul haknya untuk diangkut dengan pesawat udara”. Dalam Pasal 1 angka 19 Undang – Undang No. 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan menjelaskan mengenai rute penerbangan merupakan “..lintasan dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan yang telah ditetapkan”. Maksud dari yang ditetapkan pada pasal tersebut yaitu tiket pesawat. Pesawat dan jadwal keberangkat yang dipilih oleh penumpang merupakan salah satu prestasi yang harus dipenuhi oleh pihak maskapai. Nama maskapai pun termasuk yang tercantum di dalam tiket merupakan prestasi yang harus dipenuhi oleh pihak maskapai. Namun pada kenyataannya, banyak keluhan konsumen yang diterima oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terkait pelayanan pihak maskapai yang merugikan konsumen. Kasus yang dialami oleh konsumen antara lain ketika menggunakan maskapai LION AIR (sebuah perusahaan yang dibawah naungan PT. LION MENTARI, mulai dari masalah bagasi, keberangkatan, dan lain – lain.

Selain kasus di atas, dalam penelitian ini akan dikaji tentang kerugian konsumen akibat pengalihan moda pesawat dari Lion Air ke pesawat Wings Air. Kerugian atas pengalihan pesawat adalah akhir dari proses

pemberangkatan sampai ke tempat tujuan. Sebelum akhirnya diberangkatkan, konsumen mendapatkan pelayanan yang tidak memuaskan lebih kepada kekecewaan. Salah satu contoh kasus dialami oleh Mauliate Sitompul yang memesan tiket penerbangan dari Denpasar ke Lombok, dengan menggunakan pesawat dari maskapai PT Lion Air. Kekecewaan sudah terjadi sejak awal ketika proses keberangkatan. Pada saat *chek in* Mauliate Sitompul harus menunggu keberangkatan selama berjam – jam tanpa ada pemberitahuan dari pihak Lion Air, kemudian setelah menunggu cukup lama Mauliate Sitompul menanyakan kepada pihak maskapai, namun jawaban dari pihak petugasnya mengatakan bahwa tidak ada penerbangan Lion Air tujuan Lombok. Sementara tiket yang dipegang konsumen tertera secara pasti, tiket berlaku untuk keberangkatan dengan menggunakan pesawat Lion Air pada waktu yang ditentukan. Solusi yang diberikan petugas, keberangkatan dialihkan dengan menggunakan pesawat Wings Air, dengan alasan bahwa mengatakan jika pesawat Lion Air dan Wings Air berada pada satu grup perusahaan, dan itu sama saja. Akibat dari pelayanan yang buruk tersebut berimbas pada hal lainnya, berupa keterlambatan pemberangkatan, pelayanan atas barang bawaan, konsumen tidak dapat menghadiri pertemuan dengan calon kliennya yang sedianya direncanakan pukul 11.00 WITA sampai dengan jam 13.00 WITA di Hotel Bukit Senggigi Lombok. Akibatnya menimbulkan kerugian berupa pertemuan dengan kliennya dibatalkan, Mauliate menjadi kehilangan pendapatan atau penghasilan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena calon klien tidak jadi menggunakan jasanya.

Kejadian serupa kembali terjadi ketika Mauliate hendak kembali ke Denpasar, dalam tiket pesawat yang sudah dibeli sebelumnya akan menggunakan pesawat Lion Air, penerbangan Nomor JT. 1855 dari Bandara Praya, Lombok, Nusa Tenggara Barat, kemudian tiket diperbaharui dengan mencantumkan pengalihan moda pesawat menggunakan Wing's Air penerbangan Nomor IW. 1855 dan ditulis secara manual dengan cara mencoret nomor penerbangan sebelumnya (Nomor JT. 1855) dan memberikan tanda IW pada *boarding pass*. Kekecewaan bertambah-tambah, karena pesawat pengganti yaitu Pesawat Wings Air, penerbangan Nomor IW.1855 tertunda selama 2 (dua) jam lebih. Keterlambatan karena alasan operasional yang tidak dapat dijelaskan oleh para petugas maskapai di Bandara Praya, Lombok, Mataram.<sup>4</sup>

Kejadian yang dialami oleh konsumen jasa penerbangan di atas, bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “.memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”. Dalam kasus tersebut, Mauliate tidak menerima informasi yang benar, jelas dan jujur dari pihak maskapai terkait produk (tiket) penerbangan yang tidak sesuai dengan pesawat yang ditumpangi Mauliate dan keterlambatan yang dialaminya mengakibatkan kerugian secara material.

---

<sup>4</sup> TribunNews, *Lion Air digugat Penumpang*, <https://www.tribunnews.com/bisnis/2013/11/29/lion-air-digugat-penumpang>, 3 Agustus 2013, dikutip pada tanggal 2 Agustus 2020

Padahal dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 Undang – Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan bahwa, pengangkut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau barang serta pihak ketiga.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 39 tahun 2019 Tentang Tataan Kebandarudaraan Nasional Pasal 9 dijelaskan bahwa bandar udara merupakan pendorong dan penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan dimaksudkan untuk memudahkan transportasi ke dan dari wilayah di sekitarnya dalam menggerakkan dinamika pembangunan nasional serta sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu, adanya undang – undang mengenai penerbangan dan tataan kebandarudaraan nasional dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya pemberdayaan perlindungan konsumen melalui pembinaan dan dasar dari setiap angkutan penerbangan.

Dalam hal ini tiket merupakan produk yang dikeluarkan pelaku usaha jasa penerbangan digunakan untuk memenuhi kehidupan yang semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap masyarakat.<sup>5</sup> Kondisi kesadaran masyarakat selaku konsumen yang lemah seringkali dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memasarkan barang dan/jasa tanpa memperhatikan hak – hak konsumen.

---

<sup>5</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 4



Berhubungan dengan perlindungan konsumen sama artinya memberikan tanggung jawab terhadap pelaku usaha/tanggung jawab produk (*produk liability*), karena pada dasarnya tanggung jawab pelaku usaha dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Agnes M. Toar mengartikan tanggung jawab produk sebagai tanggung jawab para pelaku usaha untuk produk yang dibawanya kedalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada barang tersebut.<sup>6</sup> Dalam Pasal 146 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional.

Saat ini, dunia usaha penerbangan cukup mendapat perhatian karena aturan yang dikeluarkan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan mewujudkan perlindungan terhadap konsumen, dengan meletakkan hak dan kewajiban secara seimbang antara pelaku usaha dan konsumen semata-mata untuk dapat menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan latar belakang di atas, isu pengalihan moda pesawat dan akibat yang ditimbulkan menyebabkan kerugian kepada konsumen dan melahirkan tanggung jawab hukum terhadap pelaku usaha jasa penerbangan, menarik untuk diteliti sehingga penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk

---

<sup>6</sup> M Toar, Agnes, *Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara*, Penataran Hukum Perikatan II, Ujung Pandang, 17 - 29 Juli 1989

skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Perusahaan Maskapai Penerbangan Atas Pengalihan Moda Pesawat Dari Lion Air Ke Wings Air Dalam Perspektif Hukum Pengangkutan”**

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana tanggung jawab maskapai penerbangan Lion Air ke Wings Air terhadap penumpang atas pengalihan moda pesawat dalam perspektif hukum pengangkutan?
2. Bagaimana bentuk kerugian penumpang atas pengalihan moda pesawat maskapai Lion Air ke Wings Air dalam perspektif hukum pengangkutan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh penumpang untuk mendapatkan hak moda pesawat maskapai penerbangan Lion Air ke Wings Air dalam perspektif hukum pengangkutan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mengenai penerapan tanggung jawab pihak maskapai Lion Air ke Wings Air terhadap penumpang atas pengalihan moda pesawat dalam perspektif hukum pengangkutan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mengenai bentuk kerugian penumpang atas pengalihan moda pesawat dari maskapai Lion Air ke Wings Air dalam perspektif hukum pengangkutan.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mengenai upaya yang dilakukan oleh penumpang untuk mendapatkan hak atas pengalihan moda pesawat maskapai penerbangan Lion Air ke Wings Air.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam pemilihan penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat mengenai hal perlindungan konsumen. Nilai dari penelitian ialah besarnya manfaat yang didapat dari penelitian ini bagi berbagai pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi secara teoritis maupun secara praktis.

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu digunakan bagi pengembangan ilmu hukum baik secara umum maupun khusus dalam bidang hukum pengangkutan tentang penerbangan dan perlindungan konsumen terutama dalam penggunaan visualisasi tiket penerbangan pesawat yang tidak sesuai dengan pesawat yang ditumpangi konsumen.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi guna penelitian lebih lanjut dan lebih luas serta mendalami mengenai perbuatan melawan hukum dan isu mengenai pengalihan moda.

##### **2. Secara Praktis**

Secara praktis diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat, antara lain :

- a. Bagi Maskapai Penerbangan sebagai pelaku usaha, penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam kinerja Maskapai Penerbangan guna memberikan pelayanan terbaik agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

- b. Bagi operator bandara, penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam memberikan informasi yang benar kepada konsumen serta sebagai alat untuk intropeksi kinerja bandara dalam memberikan informasi.
- c. Bagi masyarakat atau konsumen diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta wawasan mengenai hak dan kewajiban serta perlindungan konsumen terkait perbuatan melawan hukum yakni isu pengalihan moda.
- d. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan terhadap pihak Maskapai Penerbangan Lion Air dan Wings Air dalam tanggung jawabnya untuk mengawasi pelaku usaha khususnya dalam perlindungan terhadap konsumen atas pembelian tiket pesawat yang tidak sesuai dengan pesawat yang ditumpangnya.
- e. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kontrol terhadap pelaku usaha khususnya dalam tanggung jawab terhadap pemberian informasi yang jelas, benar dan jujur dalam produk yang dikeluarkannya.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Konsep dari penelitian ini mengacu kepada ideologi negara yaitu Pancasila, yaitu sila ke 5 yang menjunjung tinggi terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta Pasal 1 Ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan “.. Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dimana bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan

atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), dan pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (Hukum Dasar), bukan absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas).<sup>7</sup>

Sejalan dengan teori kesejahteraan dari W.J.S Poerwadarminta mengartikan bahwa kesejahteraan tercipta karena jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan kema kmurannya dapat terpenuhi.<sup>8</sup>

Tentu apabila berbicara mengenai hukum maka berbicara mengenai Hak Asasi Manusia dimana diperjelas dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 yang mengangkat tinggi Hak Asasi Manusia pada Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 dimana pasal ini membahas tentang hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan kepada subjek hukum dengan bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument unuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum. Selain itu, hukum berfungsi sebagai instrument pelindungan bagi subjek hukum. Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, untuk memantapkan ketahanan nasional, diperlukan sistem transportasi nasional yang memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan.

---

<sup>7</sup> Azhart, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur – unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm.21

<sup>8</sup> Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976

Tujuan pembentukan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan ialah untuk menyelaraskan peran dan fungsi transportasi udara bagi Indonesia yang mempunyai posisi strategis ditinjau dari berbagai aspek. Transportasi udara merupakan satu – satunya yang cepat, efisien dan ekonomis. Disamping itu, transportasi udara juga merupakan sarana penting bagi pengembangan industri pariwisata di Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Peranan dan fungsi transportasi udara yang sangat penting ini, terutama ditinjau dari segi politik dan ekonomi telah menyebabkan perkembangan yang sangat pesat terhadap dunia penerbangan nasional. Perkembangan ini tidak hanya dalam jumlah pesawat udara tetapi juga dalam jumlah perusahaan penerbangan nasional. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang berisi ketentuan – ketentuan umum dalam kebijakan publik (pemerintah) dan sebagai payung hukum, atau sebagai ketentuan dasar yang nantinya dapat dijabarkan dalam bentuk Undang – Undang, atau peraturan pemerintah atau bentuk peraturan perundang – undangan lainnya yang bersifat operasional. Semua masalah tersebut telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Namun ternyata masalah lain yang sebenarnya tidak seharusnya diatur dalam Undang – Undang Tentang Penerbangan (bersifat hukum publik), diatur pula secara detail. Masalah yang termasuk bidang perdata, seperti ketentuan mengenai kewajiban pengangkut udara untuk mengangkut penumpang atau cargo dan masalah tiket dan pembayaran angkutan, tanggung jawab pengangkut dan batas tanggung jawab atas kerugian yang di derita jasa

angkutan dan lain sebagainya, yang seharusnya diatur dalam perdata. Ketentuan – ketentuan tersebut seharusnya diatur dalam Undang – Undang Transportasi Udara yang bersifat perdata, tidak menjadi materi muatan Undang – Undang Yang bersifat publik seperti Undang – Undang Tentang Penerbangan.

Kiranya perlu di ingat, demi adanya kepastian hukum agar tidak terdapat kesimpangsiuran dan kebingungan, sesuai dengan teori kepastian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki mengemukakan Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputus.<sup>9</sup> Khususnya bagi mereka yang terkena oleh ketentuan hukum tersebut, maka kita tempatkan setiap bentuk perundang – undangan pada kedudukannya yang sesuai dengan asas hukum dan teori perundang – undangan. Karena masalah penerbangan adalah masalah yang tidak dapat dipisahkan secara tegas dengan ketentuan –

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008 (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki I) hlm. 158.

ketentuan perundang – undangan lainnya maka sebaiknya peraturan perundang – undangan kita selaraskan dengan ketentuan lainnya.

Sejalan dengan ketentuan layanan jasa penerbangan, Undang – Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen turut mendukung terwujudnya sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi guna menumbukan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Dalam penelitian ini akan digunakan teori perlindungan hukum, dan teori hukum pembangunan. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>10</sup>

*Teori Hukum Pembangunan* yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu :

1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, dengan kata lain tujuan dan fungsi hukum Indonesia itu bukan hanya sekedar untuk memelihara ketertiban, keamanan, dan stabilisasi masyarakat dalam arti *to keep the peace at all events and at any price* tetapi diarahkan kedalam cita – cita untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai suatu kesatuan,

---

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 69



maupun untuk mencapai kesejahteraan bagi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana didalilkan oleh Pasal 27 Ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945.

2. Hukum sebagai sarana pembangunan, yang memiliki arti bahwa pembangunan hukum itu perlu dilakukan sehingga dapat menciptakan suatu sistem hukum pembangunan nasional di segala bidang, baik secara fisik maupun dalam aspek budaya yang tidak hanya mampu mempertahankan diri terhadap serangan dari luar maupun dalam negeri yang membahayakan keutuhan negara kesatuan bangsa akan tetapi bahkan mampu meningkatkan taraf hidup setiap warga negara.
3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan, seiring dengan semakin sering timbulnya perubahan dalam hubungan – hubungan antarmasyarakat semakin sering pula perubahan – perubahan yang cukup ini dirasakan sebagai ketidakadilan. Maka adalah tugas hukum untuk mempersiapkan aturan – aturan baru yang harus berlaku bagi dan dalam keadaan yang mengubah hubungan antarmasyarakat yang baru.
4. Hukum sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat. Dalam masyarakat mempunyai rencana pembangunan pembentukan kaidah – kaidah hukum yang baru akan terjadi sesudah dan menurut pola kebiasaan – kebiasaan yang telah diterima baik oleh masyarakat yang bersangkutan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1982, hlm 8.

Ketentuan yang terkait dengan topik penelitian kerugian konsumen dan tanggungjawab pelaku usaha jasa penerbangan akibat pengalihan moda pesawat adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjadi landasan hukum bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Khususnya pembinaan dalam upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperoleh haknya sebagai konsumen ketika terjadi keterlambatan penerbangan (delay). Serta pada Ketentuan Pasal 140, 146-147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Nomor 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Adapun asas yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **A. Asas – Asas yang bersifat Publik**

1. Asas manfaat; yaitu yang artinya segala bentuk usaha dan/atau kegiatan pemnagunan yang dilaksanakan dan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan semata – mata hanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Asas usaha bersama dan kekeluargaan; penyelenggaraan usaha dibidang penerbangan merupakan upaya dalam pembangunan nasional yang dilakukan dengan semnagat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan.

3. Asas adil dan merata; yaitu penyelenggaraan penerbangan harus dapat memberikan pelayanan yang merata disemua lapisan masyarakat dan menikmati semua hasil secara adil dengan sesuai nilai kemanusiaan.
4. Asas keseimbangan; bahwa penerbangan harus diselenggarakan dengan menghendaki adanya kesetaraan atau keseimbangan dalam setiap hubungan hukum dari dua subjek hukum.
5. Asas kepentingan umum; yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif
6. Asas keterpaduan yaitu, merupakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan dengan memadukan berbagai unsur dalam transportasi antar moda.
7. Asas kesadaran hukum; yaitu kesadaran terhadap masyarakat dan pemerintah terhadap peristiwa – peristiwa tertentu yang belum sejalan dengan ketentuan – ketentuan hukum dalam penyelenggaraan penerbangan.
8. Asas keselamatan penumpang; yaitu setiap penyelenggaraan angkutan jasa penerbangan harus menjunjung keselamatan penumpang yang disertai dengan asuransi.

#### **B. Asas – Asas yang bersifat Perdata**

1. Asas konsensual; yaitu perjanjian itu ada sejak ada kata sepakat antara pihak maskapai dengan penumpang yang diwujudkan dengan pembelian tiket oleh penumpang.

2. Asas koordinatif; yaitu pihak – pihak dalam pengangkutan yaitu pihak maskapai dengan penumpang mempunyai kedudukan yang setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain. Meskipun dalam kata lain pengangkut merupakan penyedia jasa dan melaksanakan perintah penumpang. Tetapi pengangkut ialah salah satu bentuk pemberian kuasa.
3. Asas campuran; yaitu pengangkutan merupakan campuran dari 3 (tiga) jenis perjanjian yakni, pemberian kuasa, penyimpanan barang dan melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut. Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini berlaku pada pengangkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan.
4. Asas pembuktian dengan dokumen; setiap pengangkutan harus dibuktikan dengan dokumen yang mendukung untuk pengangkutan penumpang maupun barang, tidak ada dokumen maka tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika sudah menjadi kebiasaan yang berlaku umum contohnya pengangkutan jarak dekat seperti angkutan dalam kota.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Tinjauan Umum tentang Hukum Penerbangan dan Perlindungan Konsumen, <https://dspace.uir.ac.id/> dikutip pada tanggal 10 juni 2020

## F. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini diartikan sebagai salah satu langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat dan bahan tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan; suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.<sup>13</sup> Prosedur atau cara untuk memperoleh kebenaran melalui langkah yang sistematis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup hal – hal sebagai berikut dibawah ini :

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan data atau gambaran seteliti mungkin mengenai objek dari permasalahan.<sup>14</sup> Artinya memberikan gambaran yang *detail* mengenai manusia, keadaan, dan gejala sosial tertentu untuk mempertegas teori yang sudah ada, menyusun teori baru atau mementahkan, menguji teori, benar tidak dilaksanakan atau efektif tidak. Dalam hal ini, akan digambarkan tentang topic pengalihan moda transportasi maskapai penerbangan dari Lion Air ke Wings Air yang merugikan konsumen. Selain itu akan menggambarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.<sup>15</sup> Kegiatan penelitian untuk memberikan

---

<sup>13</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, UGM Press, Yogyakarta, 1997 hlm. 3

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, Cet. Ke-3, 1986, hlm. 10

<sup>15</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98.

gambaran terhadap pengalihan moda transportasi maskapai penerbangan Lion Air ke Wings Air kemudian dikaji dan dianalisis dengan undang-undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Jo. Peraturan Menteri Perhubungan No. 39 Tahun 2019 Tentang Tata Nal Kebandarudaraan Nasional serta Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, dan tentunya tanggungjawab pelaku usahan jasa penerbangan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang akan dikaji dengan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan.

## **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah, norma, asas dalam hukum positif terhadap masalah isu pengalihan moda transportasi maskapai penerbangan Lion Air ke Wings Air yang menjadi fokus kajian, menggunakan data sekunder sebagai data utama. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan, atau disebut data sekunder melalui pendekatan undang – undang atau *statuta approach* atau pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk – produk hukum<sup>16</sup> dan pendekatan asas – asas hukum.<sup>17</sup> Data sekunder ialah data yang

---

<sup>16</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV Mandar, Bandung, 2008, hlm. 92

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc.Cit.*, hlm. 11

peroleh dari bahan pustaka<sup>18</sup> atau melalui studi kepustakaan (*library research*), yang dalam penelitian hukum adalah data yang memiliki kekuatan mengikat, dibedakan dalam:

- a) bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945, Peraturan Dasar, yaitu pasal – pasal UUD 1945, peraturan perundang – undangan diantaranya yaitu, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Pehubungan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Tata nagan K ebandaraan Nasional;
- b) bahan hukum sekunder, yaitu bahan – bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, buku – buku yang ditulis oleh para ahli, artikel ilmiah, jurnal, dal lain – lain,<sup>19</sup> pada hal ini penulis mengambil dari Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 441/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst
- c) bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap hukum primer dan hukum

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2005, hlm. 51

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 29

sekunder seperti kamus, yang dalam penulisan ini diolah secara selektif.<sup>20</sup>

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan melalui dua tahap, yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan dengan penelusuran literatur, penelitian terhadap data sekunder, antara lain dari bahan primer yang memiliki kekuatan mengikat.
- b. Penelitian lapangan sebagai pendukung yang ada keterkaitannya dengan isu masalah pengalihan moda transportasi maskapai penerbangan Lion Air ke Wings Air.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dalam satu tahap, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) untuk mengambil data pendukung. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan meneliti dan mengkaji data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, melalui teknik seperti :

- a. *Inventarisasi*, yaitu pengumpulan dan pencatatan data – data yang terdapat di buku – buku yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti;
- b. *Klasifikasi*, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan kedalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara jernih dan jelas terhadap apa yang sedang terjadi;

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 33



- c. *Sistematis*, yaitu menyusun data – data yang diperoleh dan telah di klasifikasikan menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

Selain penelitian sekunder didukung pula dengan penelitian lapangan (*field research*), yang dimaksudkan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder. Data primer sebagai pelengkap, yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui wawancara langsung (*interview*) dengan pihak yang sekiranya dapat memberikan penjelasan mengenai objek penulisan yang sedang dikaji.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah :

- a. Dalam penelitian kepustakaan alat pengumpul data dilakukan dengan cara meng-inventarisasi bahan – bahan hukum, berupa catatan serta laptop/komputer yang digunakan mencari data tentang bahan – bahan yang relevan dengan permasalahan topik yang sedang dibahas
- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpulan data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang di rinci dari identifikasi masalah agar mendapatkan jawaban, dan menyiapkan pertanyaan lain, alat tulis, camera, tape recorder dan flashdisk.

## 6. Analisis Data

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, digunakan analisis data secara yuridis – kuantitatif. Secara *Yuridis*, artinya penelitian ini berpusat dari peraturan – peraturan yang

ada sebagai norma hukum positif, sedangkan *Kuantitatif* dimaksudkan analisis itu dikaji secara sistematis, menyeluruh (*holistik*), dan komprehensif. Menganalisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis menghasilkan sesuatu yang utuh, menyeluruh, sistematis dan komprehensif, jika ada data kuantitatif berupa rumus matematik atau disajikan dengan statistik hanya sebagai pendukung data kualitatif.

## **7. Lokasi Penelitian**

Dalam rangka untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, maka penelitian dilakukan di beberapa perpustakaan seperti :

### **a. Perpustakaan**

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35, Bandung
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Besar No. 68, Bandung

### **b. Instansi**

- 1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kota Jawa Barat, Jalan Kawalayaan III No.4, Kota Bandung
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung, Jalan Seram No.2, Kota Bandung



## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat mempermudah penyusunan, penulis memberikan gambaran umum dari skripsi ini yang terbagi atas beberapa bab, yaitu sebagai berikut :

### **BAB I       Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang latar belakan penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, lokasi penelitian, dan pada pada akhir bab ini menguraikan mengenai sistematika penulisan.

### **BAB II       Diberi judul “Tanggung Jawab Perusahaan Maskapai Penerbangan Atas Pengalihan Moda Pesawat Dari Lion Air Ke Wings Air Dalam Perspektif Hukum Pengangkutan”**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai tanggung jawab yang dilakukan perusahaan maskapai penerbangan atas Lion Air ke Wings Air dalam hukum perspektif hukum

pengangkutan.

### **BAB III      GAMBARAN PENGALIHAN MODA PESAWAT DARI LION AIR KE WINGS AIR YANG MERUGIKAN KONSUMEN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai gambaran pengalihan moda pesawat dari Lion Air ke Wings Air yang merugikan konsumen

### **BAB IV      ANALISIS DATA YURIDIS AKIBAT HUKUM YANG DILAKUKAN PIHAK MASKAPAI PENERBANGAN SERTA TANGGUNG JAWAB YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG – UNDANG YANG BERLAKU**

Pada bab ini penulis akan menguraikan permasalahan hukum yang teridentifikasi dalam perbuatan melawan hukum, serta tanggung jawab anak perusahaan dari Lion Air kemudian dianalisis satu persatu secara tuntas dan sistematis dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha maskapai penerbangan.

### **BAB V      PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan memuat kesimpulan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan saran.

## ***OUTLINE***

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN HUKUM

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Penelitian
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Kerangka Penelitian
- F. Metode Penelitian
  - 1. Spesifikasi Penelitian
  - 2. Metode Pendekatan
  - 3. Tahapan Penelitian
  - 4. Teknik Pengumpulan Data
  - 5. Alat Pengumpul Data
  - 6. Analisis Data
  - 7. Lokasi Penelitian
  - 8. Jadwal Penelitian

### **BAB II TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN ATAS PENGALIHAN MODA PESAWAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENGANGKUTAN**

- D. Tanggungjawab Maskapai Penerbangan Terhadap Pengalihan Penumpang ke Pesawat Lain Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- E. Tanggungjawab Maskapai Penerbangan terhadap Informasi Atas Pengalihan Moda Pesawat Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- F. Tanggungjawab Perusahaan Maskapai Penerbangan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

### **BAB III GAMBARAN PENGALIHAN MODA PESAWAT DARI LION AIR KE WINGS AIR YANG MERUGIKAN KONSUMEN**

- F. Kronologis Kejadian
- G. Bentuk Kerugian Penumpang Akibat Dari Pengalihan Moda Pesawat
- H. Alasan Perusahaan Atas Pengalihan Moda Pesawat dari Lion Air ke Wings Air
- I. Pelayanan Yang Diberikan Kepada Konsumen Dalam Kejadian Pengalihan Moda Pesawat Dari Lion Air Ke Wings Air
- J. Upaya Yang Dilakukan Penumpang Untuk Menuntut Hak Atas Informasi Pelayanan Atas Pengalihan Moda Pesawat

### **BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN ATAS PENGALIHAN MODA PESAWAT DARI LION AIR KE WINGS AIR YANG MERUGIKAN PENUMPANG**

- D. Kerugian Penumpang Atas Pengalihan Moda Pesawat Dari Maskapai Penerbangan Lion Air ke Wings Air Dikaitkan Dengan Ketentuan Yang Berlaku
- E. Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Lion Air Dan Wings Air Terhadap Penumpang atas Pengalihan Moda Pesawat Dalam Perspektif Hukum Pengangkutan
- F. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Penumpang Untuk Menuntut Hak Atas Kerugian Yang Diderita Menurut Perspektif Hukum Pengangkutan

### **BAB V PENUTUP**

- C. Kesimpulan
- D. Saran